

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021)

SKRIPSI



Oleh :

REINA SEPTIANI PRIYANTI

1912321002/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

REINA SEPTIANI PRIYANTI

1912321002/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONTRUKSIYANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021)

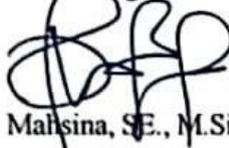
Yang diajukan

REINA SEPTIANI PRIYANTI

1912321002/FEB/AK

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi
oleh :

Pembimbing I



Mahsina, SE., M.Si

NIDN. 0717047803

Tanggal: 20-7-2023

Pembimbing II



Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA

NIDN. 8933450022

Tanggal: 20-07-2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM

NIDN. 0703106403

SKRIPSI

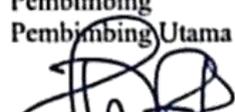
PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021)

Disusun Oleh :

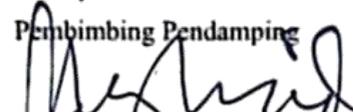
REINA SEPTIANI PRIYANTI
1912321002/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

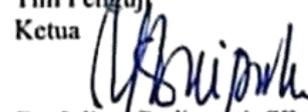
Pembimbing
Pembimbing Utama


Mahsina, SE, M. Si
NIDN. 0717047803

Pembimbing Pendamping


Dr. Masyhad, M.Si., AK., A
NIDN. 8933450022

Tim Penguji
Ketua


Dr. Juliana Pudjowati, SE., M. Si
NIDN. 0730087102

Sekretaris


Mahsina, SE., M. Si
NIDN. 0717047803

Anggota


Dr. Nova Retnowati, Dra., EC, MM.
NIDN. 8909660023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Nama : Reina Septiani Priyanti
N.I.M : 1912321002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Pada Sektor Properti, Real Estate dan Kontruksi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 20 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METRO TEMPEL', and 'FAJX150402'. The signature 'Reina Septiani Priyanti' is written in black ink over the stamp.

Reina Septiani Priyanti
NIM. 1912321002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Pada Sektor Properti, Real Estate, Dan Kontruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2021)**" merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini terkadang penulis mengalami berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat dukungan, bantuan dan dorongan dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Kedua orangtua tercinta dan kedua kakak yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah henti selama perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Siti Rosyafah.,Dra. Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Drs. Ec. Nurul Qomari M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Dr. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Mahsina, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga. Terima kasih atas kesabaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang telah bu Mahsina berikan.
7. Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen-dosen di Jurusan Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang berharga selama penulis menempuh perkuliahan. Ilmu yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu dosen menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas D angkatan 2019 Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi yang luar biasa sepanjang penelitian ini.
10. Teman kerja dan teman rumah yang telah memberikan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.

Pennulis berharap penelitian ini dapat menjadi awal yang baik untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

Surabaya, 28 Juli 2023

Penulis,

Reina Septiani Priyanti

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2021)

Oleh :

Reina Septiani Priyanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*. Struktur tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan indikator Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh adalah 47 perusahaan sehingga diperoleh 188 observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 23. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*.

Kata kunci : *Corporate Governance, Financial Distress*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL DISTRESS (STUDY IN THE PROPERTY, REAL ESTATE AND CONSTRUCTION SECTORS LISTED ON THE IDX FOR THE 2018-2021 PERIOD)

By :

Reina Septiani Priyanti

This study is intended to test whether Corporate Governance significantly affects Financial Distress. The corporate governance structure in this study uses indicators of the Board of Directors, Independent Commissioners, and Audit Committee.

This type of research is a quantitative research. This study uses secondary data obtained through the Indonesia Stock Exchange website from 2013 to 2016. The sampling technique in this study was purposive sampling., the sample obtained is 47 companies so that obtained 188 observations. Data analysis in this study using SPSS 23 program. Data analysis technique used in this study using logistic regression analysis.

The results of this study indicate that the Board of Directors, Independent Commissioners, and the Audit Committee have a significant influence on Financial Distress.

Keywords: Corporate Governance, Financial Distress

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penyusunan Skripsi.....	10
1.5 Sistematika Skripsi.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Teori Keagenan	20
2.2.2 Corporate Governance (GCG)	24
2.2.3 Financial Distress.....	37
2.3 Kerangka Konseptual.....	44
2.4 Hipotesis	44
2.4.1 Hubungan Dewan Direksi Terhadap <i>Financial Distress</i>	44
2.4.2 Hubungan Komisaris Independen Terhadap Financial Distress	45
2.4.3 Hubungan Komite Audit Terhadap Financial Distress	46
BAB III	48
METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	48

3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	48
3.3	Teknik Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	50
3.3.1	Populasi Penelitian.....	50
3.3.2	Sampel Penelitian.....	51
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.5	Pengumpulan Data.....	53
3.6	Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	53
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	54
3.6.2	Analiss Regresi Logistik	54
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	58
4.1	Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	59
1.	Perhitungan Dewan Direksi (DD).....	59
2.	Perhitungan Komisaris Independen (KI).....	61
3.	Perhitungan Komite Audit (KA).....	63
4.	Perhitungan <i>Financial Distress</i>	65
4.3	Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis	67
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	67
4.3.2	Analisis Regresi Logistik.....	68
1.	Pengujian Kelayakan Model (<i>Goodness Of Fit Test</i>).....	70
2.	Uji Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>).....	71
3.	Uji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerker R Square</i>)	72
4.	Tabel Klasifikasi 2x2 (<i>Matriks Klasifikasi</i>).....	73
5.	Estimasi Parameter.....	74
4.4	Pembahasan.....	76
4.4.1	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap <i>Financial Distress</i>	76
4.4.2	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Financial Distress</i>	77
4.4.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	79
BAB V	79
SIMPULAN DAN SARAN		79
5.1	Simpulan	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	51
Tabel 3.4.2 Sampel Perusahaan	52
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Jumlah Dewan Direksi (DD)	60
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Jumlah Komisaris Independen (KI)	62
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Jumlah Komite Audit (KA)	64
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan <i>Financial Distress</i>	66
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.6 Analisis Regresi Logistik	68
Tabel 4.7 Pengujian Kelayakan Model (<i>Goodness Of Fit Test</i>).....	69
Tabel 4.8 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>).....	70
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerker R Square</i>).....	71
Tabel 4.10 Tabel Klasifikasi 2x2 (<i>Matriks Klasifikasi</i>)	72
Tabel 4.11 Estimasi Parameter.....	74
Tabel 4.12 Estimasi Parameter.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga 2010 - 2021	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan Penjualan Rumah per Kuartal	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sampel Perusahaan

Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Jumlah Dewan Direksi

Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Jumlah Komisaris Independen

Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Jumlah Komite Audit

Lampiran 5 : Hasil Perhitungan *Financial Distress*

Lampiran 6 : *Descriptive Statistics*

Lampiran 7: Hasil Analisis Regresi Logit

Lampiran 8 : Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*)

Lampiran 9 : Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Lampiran 10 : Uji Koefisiensi Determinasi (*Nagelkerker R Square*)

Lampiran 11 : Tabel Klasifikasi 2x2 (*Matriks Klasifikasi*)

Lampiran 12 : Estimasi Parameter

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkrutan dari suatu perusahaan dapat diukur dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. Kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Model *financial distress* perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan.

Property dan real estate sendiri merupakan salah satu sub sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik dalam sektor property, real estate, dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada berbagai jenis investasi di bidang property dan real estate yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu, residential property, yang meliputi apartemen, perumahan, dan bangunan multi unit, commercial propety, yaitu properti yang dirancang untuk keperluan bisnis misalnya gedung penyimpanan barang dan area parkir, tanah dan industrial property, yaitu investasi di bidang properti yang dirancang untuk keperluan industri misalnya, bangunan-bangunan pabrik. Persaingan dalam dunia bisnis semakin kuat seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik

Hal ini dikarenakan setiap perusahaan berusaha untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan kemakmuran pemilik serta pemegang saham melalui peningkatan dari nilai perusahaan.

Sektor perumahan melibatkan banyak pelaku ekonomi. Mulai dari pengembang (developer), kontraktor, pekerja konstruksi, investor (homeowner), penyewa (renter), dan lembaga keuangan. Pengaruh sektor perumahan bagi perekonomian juga relatif besar. Dampak multiplier (multiplier effect) yang timbul dari kegiatan di sektor perumahan sangat beragam. Banyak kegiatan ekonomi yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor perumahan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga industri besi baja. Itulah kenapa di banyak negara, otoritasnya memberikan perhatian besar terhadap setiap perkembangan di sektor perumahan.

Munculnya pandemi virus COVID-19 menyebabkan segala aktivitas yang ada di dunia terhambat, selain memakan korban jiwa, pandemi COVID-19 juga berdampak pada aktivitas perekonomian. Khan dan Ullah (2020) menyatakan bahwa peningkatan angka kematian akibat dari penyebaran virus COVID-19 membuat aktivitas perekonomian global melemah. Maka dari itu, upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah di berbagai negara menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat hingga penutupan segala aktivitas di negaranya. Di Indonesia cara tersebut dilakukan dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Sari, 2020). Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki konsekuensi pada sektor perekonomian, dimana hal ini dapat dilihat melalui PDB Indonesia yang berkontraksi sebesar 2.07% pada tahun 2020.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia yang menyebabkan perusahaan dan usaha-usaha kecil tidak dapat beroperasi secara normal dan memaksimalkan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Ketika perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan, perusahaan tersebut akan kesulitan dalam mengelola arus keuangan mereka, sehingga berujung pada krisis keuangan bahkan kebangkrutan. Ancaman kebangkrutan ini membayangi hampir semua elemen dari berbagai sektor industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

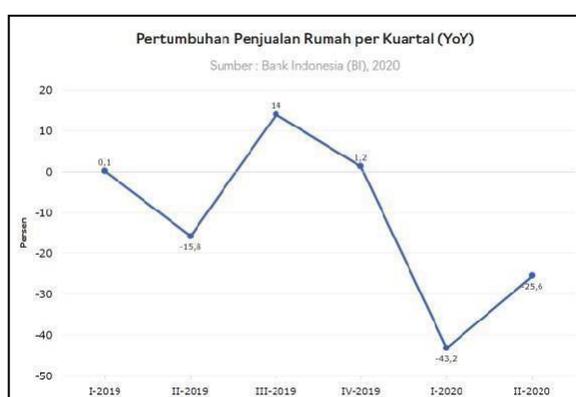
Sektor properti menjadi satu dari banyaknya sektor industri yang merasakan efek dari pandemi COVID-19. Sektor properti telah mengalami penurunan sebesar 60% dibandingkan dengan tahun 2019 (Budhiman, 2020). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 2,63% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer mereka untuk dapat bertahan dan menghadapi akibat dari pandemi COVID-19, sehingga yang dibelanjakan adalah kebutuhan sehari-hari dan simpanan dana darurat lainnya.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga 2010 - 2021

Sumber : databoks.katadata.co.id (2020)

Berdasarkan pertumbuhan penjualan rumah per kuartal di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan pada kuartal I tahun 2020, penjualan rumah turun hingga minus sebesar 43.2% dibandingkan dengan tahun 2019 (y-o-y). Penurunan berlanjut hingga pada kuartal II tahun 2020 dengan total minus 25.6%. Walaupun terjadi peningkatan, namun angka tersebut masih dibawah 0% (Databoks, 2020).



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penjualan Rumah per Kuartal

Sumber : databoks.katadata.co.id (2020)

Dengan menurunnya angka penjualan, perusahaan tidak mendapatkan pendapatan, sehingga mengakibatkan perusahaan tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur ataupun konsumen. Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi investor yang melakukan investasi pada perusahaan sektor properti, dimana jika perusahaan yang dipilih oleh investor memiliki kinerja yang tidak cukup baik dalam men-goperasikan perusahaannya maka akan berisiko bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Terdapat fenomena beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pelunasan Utang (PKPU) hingga permohonan Pailit, hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Salah satu perusahaan yang telah resmi pailit adalah PT. Cowell Development Tbk (COWL). COWL dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar hutangnya kepada para krediturnya. Tidak mampu beroperasi secara maksimalnya perusahaan saat situasi pandemi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas hingga pada ancaman kebangkrutan. Tetapi kondisi COWL berbanding jauh dengan PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang sebaliknya dapat mencatatkan laba tertinggi pada situasi pandemi, dimana kinerja LPKR terbukti bahwa kinerja perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, dimana strategi yang diambil oleh LPKR adalah strategi yang tepat.

Perusahaan yang tidak memiliki strategi yang cukup baik tentunya akan lebih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Maka dari itu untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 penting bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan mereka, dimana dapat dilihat dari kondisi *financial distress* atau kinerja keuangan perusahaan. *Financial distress* merupakan salah satu kondisi yang seringkali menyebabkan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi *financial distress* mereka agar perusahaan mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Kondisi *financial distress* dapat dilihat dari komposisi hutang perusahaan, dimana menurut (Dewi, Jordy, & Wijaya, 2021) bahwa yang mempengaruhi rasio hutang terhadap ekuitas adalah current ratio dan inventory turnover. Sehingga, komposisi asset pada laporan keuangan juga perlu menjadi perhatian dalam menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan. Jika dalam analisis ditemukan kondisi perusahaan tidak sehat maka perusahaan dapat segera mengambil tindakan

serta perencanaan strategi untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan yang berada dalam kondisi sehat atau baik agar tetap dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalisir risiko kebangkrutan. Selain bagi perusahaan, hal ini juga penting bagi investor publik karena mereka dapat mengetahui perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia yang telah menunjukkan tanda-tanda akan bangkrut atau pailit agar mereka bisa mengamankan dana yang mereka miliki dan terhindar dari risiko yang ditimbulkan.

Good Corporate Governance atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan belum mampu melaksanakan corporate governance dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Dengan adanya penerapan corporate governance yang baik, manajer perusahaan akan selalu mengambil tindakan yang tepat dan tidak mementingkan

diri sendiri, serta dapat melindungi stakeholders perusahaan. Penerapan mekanisme corporate governance yang baik akan menekan risiko perusahaan mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. Adanya ancaman tersebut menyebabkan para manajer berpikir ulang mengenai strategi-strategi yang layak untuk mengantisipasi yang menyebabkan terjadinya permasalahan keuangan.

Kesulitan keuangan atau *Financial Distress* merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Platt dan Platt (2002) mendefinisikan *Financial Distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang amat signifikan sehingga dapat diidentifikasi sebagai awal mula masalah keuangan yang lebih serius lagi seperti likuidasi atau kebangkrutan. Menurut Altman dan Hotchkiss (2005), *Financial Distress* terjadi sebelum kebangkrutan dan dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Kesulitan keuangan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah kegagalan ekonomi (*economic failure*) yang terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menutupi biaya operasi perusahaan. Kedua adalah kegagalan keuangan (*financial failure*) yang disebabkan oleh *technical insolvency* atau situasi dimana perusahaan gagal membayar kewajibannya yang jatuh tempo namun aset yang dimiliki besar dari total hutang yang dimiliki, dan situasi kebangkrutan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi perusahaan tidak dapat dicapai.

Menurut Hatianah (2017) *Financial Distress* dipengaruhi oleh berbagai

faktor baik yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi *Financial Distress* adalah kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang perusahaan, tata kelola perusahaan yang buruk dan kerugian yang dialami perusahaan dalam kegiatan operasional selama beberapa tahun. Faktor eksternal yang mempengaruhi *financial distress* lebih bersifat makro ekonomi dan memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung, seperti kenaikan indeks harga saham gabungan, inflasi dan nilai tukar.

Kebangkrutan merupakan situasi yang paling tidak diinginkan oleh semua pelaku bisnis karena kebangkrutan merupakan akhir dari keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance* dengan kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress*. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Elloumi & Gueyie (2001), dalam penelitiannya menemukan bahwa proporsi direksi independen dan kepemilikan *blackholder* secara negatif berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress*, sedangkan kepemilikan oleh direktur independen memiliki efek negatif pada kemungkinan *Financial Distress*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wardhani (2007), dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki dampak negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress*, namun tidak ditemukan adanya pengaruh antara Proporsi Komisaris Independen dan struktur kepemilikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress*. Siagian (2010) dalam penelitiannya terkait *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*, menemukan bahwa Jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan

terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Sedangkan ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penulisan skripsi ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (pada sektor property, Real Estate dan Konstruksi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* ?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* ?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh ukuran Dewan Direksi dalam suatu perusahaan terhadap kondisi kesulitan atau *Financial Distress*.
2. Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan terhadap kondisi kesulitan atau *Financial Distress*.
3. Mengetahui pengaruh Komite Audit dalam suatu perusahaan terhadap kondisi kesulitan atau *Financial Distress*.

1.4 Manfaat Penyusunan Skripsi

Selain mempunyai tujuan, penyusunan skripsi ini mempunyai manfaat yang dipandang dari beberapa sudut yaitu :

a. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara masalah-masalah dalam praktek dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan, pertimbangan, pengukuran serta penilaian hasil kerja yang telah dilakukan selama ini.

c. Manfaat Bagi Universitas

Merupakan suatu bukti pengabdian penulis sebagai mahasiswa kepada almamater tercinta, juga sebagai perbendaharaan kepustakaan dan acuan bagi peneliti yang lain.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini terbagi atas lima bab dan tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi : kerangka proses berfikir, definisi operasional dan pengukuran variable, Teknik penentuan populasi, besar sampel dan Teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data, pengujian data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, serta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *Corporate Governance* dan *Financial Distress*. Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian mengenai *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*.

1. Elloumi dan Gueyie (2001)

Penelitian ini meneliti mengenai *Financial Distress and Corporate Governance : An Empirical Analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Independen : *Outside directors dan Boss (CEO duality)* terhadap *Financial Distress dan CEO turnover* dan menggunakan *Audit committee, Blackholder, Leverage, dan liquidity* sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini yaitu kepemilikan *outside directors* (dewan komisaris) dan *directorship* mempengaruhi kemungkinan *Financial Distress*, perusahaan *Financial Distress* yang melakukan pergantian CEO, mempunyai dualitas CEO - ketua dewan yang rendah, dan mempunyai kepemilikan *external blockholding* yang lebih sedikit.

2. Wardhani (2007)

Penelitian ini meneliti mengenai mekanisme *Corporate Governance* dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (*financially distressed firms*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan praktek *Corporate Governance* pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financially*

distressed firm). Praktek *Corporate Governance* yang diteliti disini adalah struktur *Corporate Governance* yang meliputi board (direksi dan komisaris), independensi dari board (komisaris independen), perputaran (turnover) dari board, dan juga struktur kepemilikan perusahaan. Pengujian ini juga menyertakan nilai total aset sebagai variabel ukuran perusahaan yang ditransformasi melalui proses logaritma dan variabel dummy untuk tahun terjadinya tekanan keuangan sebagai variabel kontrol. Sampel yang diambil adalah pasangan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan, diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan periode laporan keuangan dari tahun 1999 sampai 2004. Hasil dari penelitian ini adalah board size berhubungan positif dengan permasalahan keuangan. Terkait ukuran direksi, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan memiliki jumlah komisaris yang lebih sedikit dan turnover dari direksi juga memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hasil yang tidak signifikan didapatkan untuk variabel proporsi komisaris independen dan struktur kepemilikan.

3. Siagian (2010)

Penelitian ini meneliti mengenai Analisis pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap perusahaan yang mengalami *Financial Distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, presentase kepemilikan investor institusional, presentase kepemilikan keluarga, dan ukuran komite audit terhadap *Financial Distress*. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan dari tahun 2005-2009. Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan, sedangkan ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.

4. Deviacita dan Achmad (2012)

Penelitian ini meneliti mengenai analisis pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, serta keahlian komite audit) terhadap *Financial Distress*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

perusahaan manufaktur di Indonesia, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2006-2010. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan keahlian komite audit. Variabel dependen yang digunakan adalah *Financial Distress*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan saham oleh dewan direksi, kepemilikan saham oleh institusi, dan keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*, sedangkan penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh

ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan aktivitas dewan komisaris terhadap *Financial Distress*.

5. Sastriana dan Fuad (2013)

Penelitian ini meneliti mengenai Pengaruh *Corporate Governance* dan *firm size* terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan *firm size*. *Financial Distress* sebagai variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan leverage dan likuiditas sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan struktur dari *Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Variabel jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kondisi *Financial Distress* pada suatu perusahaan, sedangkan variabel lainnya berupa proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan (*firm size*) terbukti tidak berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress*.

6. Hanifah dan Purwanto (2013)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh struktur *Corporate Governance* dan *financial indicators* terhadap kondisi *Financial Distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan *operating capacity* berpengaruh

terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai dengan 2011. Hasil dari penelitian ini adalah Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan *operating capacity* berpengaruh terhadap Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh struktur *Corporate Governance* dan *financial indicators* terhadap komdisi *Financial Distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan *operating capacity* berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai dengan 2011. Hasil dari penelitian ini adalah Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan *operating capacity* berpengaruh terhadap *financial distress* dan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, likuiditas, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

7. Putri dan Merkusiwati (2014)

Penelitian ini meneliti mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada *Financial Distress*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan

institusional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan pada *Financial Distress*. Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah *Financial Distress* atau kondisi kesulitan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, likuiditas, dan leverage tidak berpengaruh signifikan pada *financial distress*. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *financial distress*.

8. Mayangsari (2015)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, dan leverage terhadap *financial distress*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2011- 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, leverage tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*, dewan direksi berpengaruh negatif

terhadap *financial distress*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Elloumi dan Gueyie (2001)	<i>Financial Distress and Corporate Governance : An Empirical Analysis</i>	Independen: <i>Outsidedirectors</i> dan <i>Boss (CEO duality)</i> Dependen : <i>Financial Distress</i> dan <i>CEO turnover</i> Kontrol : <i>Audit committee, Blackholder Leverage, dan liquidity</i>	Komposisi dari boards memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan mengalami <i>Financial Distress</i> . Kemudian kepemilikan board baik di dalam maupun di luar perusahaan mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengalami <i>Financial Distress</i> . Terdapat perbedaan antara perusahaan yang mengalami <i>Financial Distress</i> yang didasari dari pergantian CEO sebagai proxi dari turnaround strategy dapat memberikan tambahan pengetahuan yang lebih luas dan berguna mengenai karakteristik <i>Corporate Governance</i> dalam konteks <i>Financial Distress</i> .
2	Wardhani (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (<i>Financially Distressed Firms</i>)	Independen : Ukuran dewan (ukuran dewan direksi dan dewan komisaris), Independensi dewan, <i>Turnover</i> direksi (direksi masuk dan direksi keluar), dan Struktur Kepemilikan (Kepemilikan bank dan kepemilikan direksi) Dependen : <i>Financial Distress</i> Kontrol : <i>Log total asset dan Dummy year</i>	<i>Board size</i> berhubungan positif dengan permasalahan keuangan. Terkait ukuran direksi, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan memiliki jumlah komisaris yang lebih sedikit dan turnover dari direksi juga memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hasil yang tidak signifikan didapatkan untuk variabel proporsi komisaris independen dan struktur kepemilikan.
3	Siagian (2010)	Analisis pengaruh struktur <i>Corporate Governance</i> terhadap perusahaan yang mengalami <i>Financial Distress</i>	Independen : Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, presentase kepemilikan investor institusional, presentase kepemilikan keluarga, dan ukuran komite audit Dependen : <i>Financial Distress</i>	Jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Sedangkan ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
4	Deviacita dan Achmad (2012)	Analisis pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i>	Independen : ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, likuiditas, leverage, profitabilitas dan <i>operating capacity</i> Dependen : <i>Financial Distress</i>	Kepemilikan saham oleh dewan direksi, kepemilikan saham oleh institusi, dan keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> , sedangkan penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan aktivitas dewan komisaris terhadap <i>Financial Distress</i>
5	Sastriana dan Fuad (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>firm size</i> terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (<i>Financial Distress</i>)	Independen : Jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan <i>firm size</i> Dependen : <i>Financial Distress</i> Kontrol: <i>Leverage</i> dan Likuiditas	Hasil penelitian ini menunjukkan struktur dari <i>Corporate Governance</i> yang berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Variabel jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kondisi <i>Financial Distress</i> pada suatu perusahaan. sedangkan variabel lainnya berupa proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan (<i>firm size</i>) terbukti tidak berpengaruh terhadap kondisi <i>Financial Distress</i> .
6	Hanifah dan Purwanto (2013)	Pengaruh struktur <i>Corporate Governance</i> dan <i>Financial Indicators</i> terhadap kondisi <i>Financial Distress</i>	Independen : ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan <i>operating capacity</i> Dependen : <i>Financial Distress</i>	Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>leverage</i> , dan <i>operating capacity</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> dan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> , profitabilitas, dan <i>operating capacity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>
7	Putri dan Merkusiwati (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan pada <i>Financial Distress</i>	Dependen: <i>financial distress</i> . Independen: kepemilikan institusional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan	Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, likuiditas, dan leverage tidak berpengaruh signifikan pada <i>financial distress</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada <i>financial distress</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
8	Mayangsari (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Distres	Independen : dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, dan leverage Dependen : <i>Financial Distress</i>	dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , leverage tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , dewan direksi berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> , dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi ketika *principal* kesulitan untuk memastikan kesejahteraan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) seperti halnya yang dijelaskan oleh Jansen dan Meckling (1976:5).

Konsekuensi dari pandangan perspektif *agency theory* ini menimbulkan permasalahan yang dapat digolongkan kedalam dua, yaitu (Pagalung, 2004:140) :

1. Permasalahan agensi (*the agency problem*), hal ini muncul ketika terjadi konflik antara prinsipal dan agensi yang berkaitan dengan tujuan (*goals*) perusahaan dan ketika prinsipal mengalami kesulitan memverifikasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agensi.
2. Pembagian risiko (*the problem of risk sharing*), hal ini muncul ketika prinsipal dan agensi memiliki perbedaan cara pandang yang berbeda atas risiko itu sendiri.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arief (2007:5), teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* dan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang sahan (*principal*) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. Situasi ini memicu munculnya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Yaitu suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi.

Manajemen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah

diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, *principal* sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh *principal* untuk memberikan insentif pada agen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung risiko. Agen, yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi akses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan *principal* tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dan sebagainya Yushita (2009:58).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shliefer dan Vishny, 1997). Dengan kata

lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976:6) terdiri dari:

a. The monitoring expenditures by the principle

Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction, compensation policies*.

b. The bonding expenditures by the agent.

The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.

c. The residual loss

Merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

2.2.1.1 Shareholding Theory

Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi *CG* yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan

oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa *CG* sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan (Yustianti, 2009:10).

2.2.1.2 Stakeholding Theory

Stakeholding theory diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi (Yustianti, 2009:11).

2.2.2 Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting di Indonesia karena perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak atau belum melaksanakan GCG, sehingga akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif secara global. Corporate Governance merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham. Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk berkembang dengan lebih baik dan sehat. Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas.

Wahyudi Prakarsa (2009:5), memberikan pengertian tentang *good corporate governance* yaitu: “Sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders)”.

Menurut Yessy Amanda (2014) dalam Effendi (2009:1) menyimpulkan definisi corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sedangkan definisi *good corporate governance* Menurut Bank Dunia (*World Bank*) yang dikutip oleh Effendi (2009:2) adalah: Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Corporate Governance ialah : Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Dari definisi diatas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan .

Dalam tataran konsep, GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh Karena itu, struktur GCG seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut :

- 1) Adanya pemisahan antara hak dan kewajiban anatara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan steakholder. Disamping

itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.

2) Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* ini diharapkan dapat menjadi titik tujuan bagi para pemerintah dalam membangun firework bagi penerapan *Good Corporate Governace*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk peningkatan nilai kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum terdapat lima (5) prinsip dasar dari *Good Corporate Governace* yaitu :

1) *Transparancy* (Keterbukaan informasi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Sehingga menunjukkan perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya dan kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:39) menyatakan bahwa informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi,

misi, sasaran usaha dan strategis, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan sebagai berikut :

- a) Pengungkapan informasi harus meliputi, tapi tidak terbatas pada informasi material tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara, anggota dewan komisaris dan direksi serta penghasilannya, faktor-faktor risiko akan datang yang material, isu-isu material yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya dan struktur dan kebijakan Governance perusahaan.
- b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sesuai standar standar kualitas tinggi di bidang akuntansi.
- c) Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan eksternal yang objektif.

d) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Selain itu, prinsip akuntabilitas agar perusahaan dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan maka disini perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaannya. Berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas Tri Gunarsih (dalam Achmad Daniri (2006:14) menyatakan: Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, Komite Audit, serta remunerasi eksekutif. Good Corporate Governnace memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balance di perusahaan. Untuk menjalankan bisnis modern, diperlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, teknologi, dan aktiva tetap. Investasi besar tersebut perlu dimanfaatkan oleh personel dengan akuntabilitas tinggi untuk memungkinkan dihasilkannya Return On Investment (ROI) yang memadai. ROI memadai inilah yang menjanjikan

kelangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Beberapa karakteristik akuntabilitas:

a) Pemegang saham

Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggung jawab pada saat dia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggungjawab serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Dewan direksi

(1) Anggota dewan bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, niat yang baik, penelitian yang cermat dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. (2) Dewan harus memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder. (3) Dewan harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan secara independen khususnya terhadap manajemen.

c) Dewan komisaris

Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengatasi tindakan direksi dan memberi nasehat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Setiap anggota dewan komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perseroan dan harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan fungsi dan tanggungjawab dan memperhatikan berbagai stakeholder terhadap perusahaan. Dewan Komisaris harus memantau efektifitas praktek GCG yang diterapkan perseroan dan bilamana perlu melakukan penyesuaian.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Praktek bisnis oleh perusahaan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya dapat dipastikan akankehilangan bisnisnya. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, melalui prinsip ini juga diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.(Achmad Daniri,2005:11)

4) *Independency* (Kemandirian) Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat sekali penting sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Independensi bagi para anggota direksi terwujud dalam keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan atau pedoman pada berbagai tingkatan.

Dari pernyataan tersebut berarti seluruh organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut Adrian Sutedi (2011:12) mengemukakan pendapatnya: Kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak investor atau pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari berbagai kejahatan demi terlaksananya komitmen antara investor.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, serta ras.

c. Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah :

- 1) Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.
- 2) Mengoptimalkan (untuk menghindari maksimalisasi) pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha.

3) Memperbesar keuntungan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas domestic ketika bersaing di pasar Internasional.

d. Manfaat *Good Corporate Governace*

Good Corporate Governace yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan Good Corporate Governace yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya krisis juga kegagalan yang serupa dimasa mendatang.

Menurut FCGI, pelaksanaan Good Corporate Governace diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Dengan Good Corporate Governace , integritas perusahaan lebih dipercaya pihak luar yang berkepentingan (stakeholder), memacu profesionalisme karyawan,

kinerja keuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang baik. Adapun keuntungan yang diperoleh dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah:

- 1) Menurunkan risiko Dengan melaksanakan GCG akan dapat meminimalkan praktek-praktek KKN yang terjadi di perusahaan. Praktek-praktek yang tidak sehat tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan risiko-risiko kerugian perusahaan bahkan kebangkrutan.
- 2) Meningkatkan nilai saham Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor atau publik terhadap perusahaan dengan meningkatnya kepercayaan akan menjadikan nilai sahamnya banyak diminati di bursa, sehingga akan berdampak positif pada kenaikan nilai saham.
- 3) Menjamin kepatuhan Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur dan operasi perusahaan ditujukan untuk mengatur aktivitas dan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak yang terkait. Keseimbangan dengan seluruhstakeholders mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturanaturan yang ditetapkan.
- 4) Memiliki daya tahan Dengan melaksanakan GCG perusahaan akan lebih memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya.
- 5) Memacu kinerja Melalui mekanisme supervisi kinerja manajemen dan mempertegas pertanggung jawaban komisaris dan direksi kepada pemegang

saham dan stakeholders lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.

6) Meningkatkan akuntabilitas publik GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders dan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

7) Membantu penerimaan negara Dengan transparansi dan dipatuhinya peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara yang meningkat. Khususnya bagi BUMN dengan kinerja yang prima akan meningkatkan laba operasi dan nilai saham yang tinggi sehingga akan meningkatkan bagian laba pemerintah.

Maka jika setiap perusahaan semakin banyak menerapkan GCG maka semakin cepat pemulihan ekonomi yang akan dapat dirasakan seluruh masyarakat secara nasional. Seperti misalnya pergerakan dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan baik, kesempatan kerja semakin besar, kemampuan bersaing lebih tinggi baik lokal maupun internasional.

Menurut Muh. Arief Effendi (2009 : 65), manfaat dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
- 2) Peningkatan efisiensi operasional perusahaan
- 3) Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

4) Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value).

5) Peningkatan minat investor untuk membeli saham yang bersangkutan.

Berangkat dari beberapa tujuan diatas, maka pelaksanaan GCG pada perusahaan diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada perusahaan, pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan pertumbuhan industri ketika melaksanakan GCG.

2.2.3 *Financial Distress*

a. Pengertian *Financial Distress*

Financial Distress atau sering disebut kesulitan keuangan adalah kondisi dimana perusahaan berada dalam kesulitan keuangan sehingga tidak dapat menyediakan dana untuk memenuhi hutang lancarnya. *Platt dan Platt (2002)* mendefinisikan *Financial Distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Perusahaan dikatakan mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan adalah jika perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan permasalahan dalam melakukan pembayaran hutang yang sudah jath tempo (Siagian, 2010). *Financial Distress* juga merupakan suatu momen saat perusahaan menuju kearah kebangkrutan karena keuangan (Haryetti, 2010). Analisis laporan keuangan dapat menjadi sebuah prediksi mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Prediksi ini sangat penting bagi semua

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.

Menurut *Financial Distress* digolongkan kedalam empat istilah umum, yaitu:

a. *Economic failure* *Economic failure* atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal atau *cost of capital*. Perusahaan dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemiliknya berkenan menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) di bawah tingkat bunga pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

b. *Business failure* *Business failure* atau kegagalan bisnis adalah bisnis yang menghentikan operasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan keuntungan atau mendatangkan penghasilan yang cukup dengan akibat kerugian kepada kreditur. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk pengeluaran.

c. *Insolvency* *Insolvency* terbagi menjadi tiga, yaitu *technical insolvency* dan *Insolvency in bankruptcy*.

1. Technical insolvency

Technical insolvency atau insolvensi teknis, terjadi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo walaupun total aktiva sudah melebihi total hutangnya. *Technical insolvency* bersifat sementara, jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan terhindar dari kemungkinan terjadinya *Financial Distress*. Tetapi apabila *technical*

insolvency adalah gejala awal kegagalan ekonomi, maka kemungkinan selanjutnya dapat terjadi bencana keuangan atau financial disaster.

2. Insolvency in bankruptcy

Kondisi insolvency in bankruptcy lebih serius dibandingkan dengan technical insolvency. Perusahaan dikatakan mengalami insolvency in bankruptcy jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset yang dapat mengarah kepada likuidasi bisnis. Legal bankruptcy Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi oleh undang-undang. Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *Financial Distress* adalah:

- a. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.
- b. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.
- c. Memberikan tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

b. Penyebab *Financial Distress*

Menurut Damodaran (1997) kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan, Faktor- faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu :

- a. Faktor internal kesulitan keuangan
 - 1) Kesulitan arus kas

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (cash flow) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi devisit.

2) Besarnya jumlah utang

Perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi devisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari perasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pihak bank. Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (default) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

3) Kerugian Operasional

Kerugian operasional perusahaan selama beberapa tahun merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

Sedangkan menurut Kamaluddin dan Pribadi (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* antara lain: sensitivitas pendapatan perusahaan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan, proporsi biaya tetap terhadap biaya variabel, likuiditas dan kondisi pasar dari asset perusahaan, kemampuan kas

terhadap bisnis perusahaan. *Financial distress* dapat ditinjau dari komposisi neraca- jumlah asset dan kewajiban, dari laporan laba rugi – jika perusahaan terus menerus rugi, dan dari laporan arus kas – jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar. Semua laporan tersebut merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi atau pembukuan perusahaan.

b. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan factor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman.

Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank atau non-bank, merupakan solusi yang harus ditempuh oleh manajemen agar proses produksi dan investasi berjalan lancar. Menurut Almilia dan Kristijadi (2003) Prediksi *Financial Distress* perusahaan ini menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut meliputi :

1) Pemberi pinjaman

Penelitian berkaitan dengan prediksi *Financial Distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.

2) Investor

Model prediksi *Financial Distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga

3) Regulator

Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.

4) Pemerintah

Prediksi *Financial Distress* juga penting bagi pemerintah dan antitrust regulation.

5) Auditor

Model prediksi *Financial Distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.

6) Manajemen

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi *Financial Distress* diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan biaya tidak langsung dari kebangkrutan.

Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal distress seperti : penundaan pengiriman, masalah kualitas produk, dan tagihan dari bank

(Platt dan Platt, 2002). Hal ini bertujuan untuk mengindikasikan adanya *financial distress* yang dialami oleh perusahaan sehingga pihak-pihak tersebut dapat menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi kondisi tersebut (Triwahyuningtias, 2012). Dengan mengetahui kondisi *Financial Distress* diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan sedini mungkin Almilia dan Kristijadi (2003).

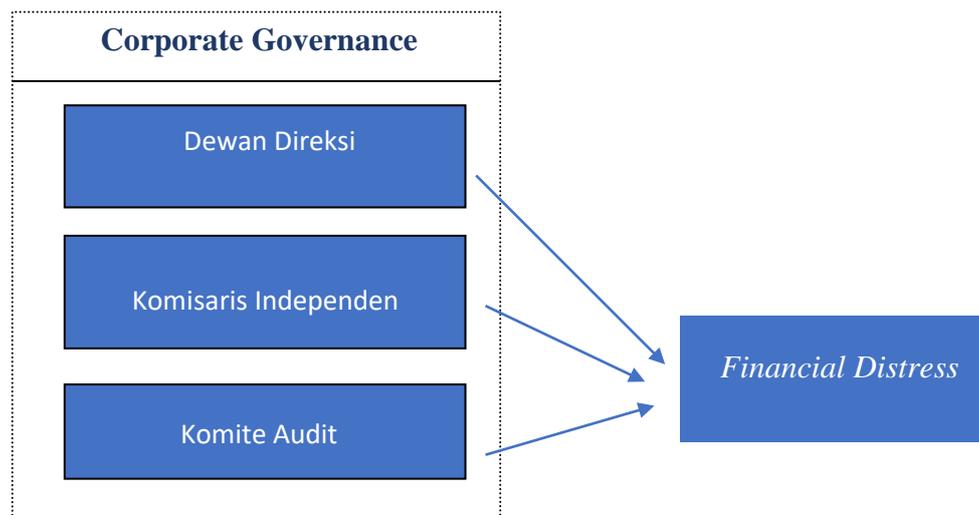
Menurut Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *Financial Distress* adalah:

- 1) Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan pada masa yang akan datang
- 2) Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan baik
- 3) Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan. Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengujian bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* (Platt dan Platt, 2005) seperti :

- 1) Adanya pemberhentian tenaga kerja atau tidak melakukan pembayaran dividen (Lau, 1987; Hill et al., 1996)
- 2) Interest coverage ratio (Asquith, Gertner dan Scharfstein, 1994)
- 3) Arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang saat ini (Whitaker, 1999)
- 4) Laba bersih operasi (net operating income) negatif (Hofer, 1980; Whitaker, 1999)

- 5) Adanya perubahan harga ekuitas (John, Lang dan Netter, 1992)
- 6) Perusahaan dihentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan perusahaan tersebut dipersyaratkan untuk melakukan perencanaan restrukturisasi (Tirapat dan Nittayagasetwat, 1999)
- 7) Perusahaan mengalami pelanggaran teknis dalam hutang dan diprediksi perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang (Wilkins, 1997)
- 8) Mempunyai Earning Per Share (EPS) negatif (Eliomi dan Gueyle, 2001).

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

a. Hubungan Dewan Direksi Terhadap Finansial Distress

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pfefer dan Salancik (1978) dalam Siagian (2010) mengatakan bahwa peningkatan ukuran dan diversitas Dewan Direksi akan memberikan manfaat bagi

perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Penelitian Wardhani (2007) dan Siagian (2010) menyatakan semakin besar jumlah Dewan Direksi maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan atau *Financial Distress*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi atau tidaknya *Financial Distress* dapat disebabkan oleh kinerja board of director yang kurang efektif sehingga kondisi perusahaan tidak liquid terhadap kewajibannya (Siagian, 2010). Namun hasil berbeda terjadi pada penelitian Bodroastuti (2009) dan Sastriana dan Fuad (2013) yang menyatakan semakin besar jumlah Dewan Direksi semakin memperkecil potensi terjadinya kesulitan keuangan.

Keberadaan Dewan Direksi dalam sebuah perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik, informasi yang diberikan diharapkan mampu menjadi arahan bagi manajemen dalam menjalankan perusahaan, sehingga potensi salah urus (miss management) yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimalkan (Sastriana dan Fuad, 2013). Berdasarkan argumen diatas, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Dewan Direksi berpengaruh terhadap Financial Distress

b. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Financial Distress

Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi atau pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu (KNKG, 2006). Dengan adanya

komisaris independen, selain adanya pengawasan pengambilan keputusan manajemen oleh pihak dewan komisaris, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal yang independen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Elloumi dan Gueyie (2001) menyatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap *Financial Distress*, sehingga menunjukkan semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan semakin memperkecil potensi terjadinya *Financial Distress*, sedangkan menurut penelitian Sastriana dan Fuad (2013) dan Wardhani (2007) menyatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap terjadinya *Financial Distress*. Hal ini mungkin dikarenakan keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan yang bersangkutan hanya bersifat sebagai formalitas saja atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan regulasi (Siagian, 2010). Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap Financial Distress

c. Hubungan Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Komite audit merupakan mekanisme Corporate Governance yang diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan yang apabila terjadi terus menerus dapat menimbulkan *Financial Distress* pada perusahaan (Hanifah dan Purwanto, 2013). Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari tiga

orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi *Financial Distress*. Bila komite Audit berfungsi secara efektif maka kontrol atas perusahaan akan lebih baik karena Komite Audit dapat membantu dewan komisaris dalam hal pemberian nasihat kepada manajemen mengenai tindakan perbaikan atas celah-celah penyimpangan risiko dari keputusan yang dibuat sebagai risiko salah mengambil keputusan keuangan dapat diminalkan dan kerugian mampu dideteksi sebelum benar-benar terjadi (Siagian, 2010). Namun penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Purwanto (2013) dan Mayangsari (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Komite Audit dengan *Financial Distress*. Semakin banyak anggota Komite Audit terkadang lebih menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kinerjanya (Hanifah dan Purwanto, 2013). Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap Financial Distress

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini diambil karena peneliti berusaha menjelaskan berbagai hubungan dan pengaruh yang timbul dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu antara variabel *corporate governance* yang diwakili oleh variabel Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan variabel *Financial Distress*. Menggunakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan alat statistik yang selanjutnya akan diberikan penjelasan secara deskriptif mengenai hasil penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Menurut Sugiyono (2016: 39) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dapat disimbolkan dengan Y. Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan.

Variabel dependen ini dikotomi atau *dummy*, dimana terdiri dari dua klasifikasi yang mewakili status perusahaan, yaitu :

- 1) *Distressed* = 1 ; apabila perusahaan mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan
- 2) *Distressed* = 0 ; apabila perusahaan tidak mengalami *Financial Distress* mengalami kesulitan keuangan

Indikator dalam penelitian ini yaitu, Dummy, jika EPS negative, 0 jika EPS positif. Kriteria yang digunakan untuk menentukan perusahaan *financial distress* adalah dilihat berdasarkan *Earning per Share* (EPS). Penggunaan *Earning per Share* (EPS) sebagai proksi variabel dependen karena *Earning per Share* menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan perlembar saham yang akan dibagikan pada pemilik saham, dimana keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan operasinya. Jika EPS suatu perusahaan dalam kondisi negatif maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi *Financial Distress*.
Variabel Bebas (*Independen Variable*)

Menurut Sugiyono (2016 : 39) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dapat disimbolkan dengan X. Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah:

1. Dewan Direksi (DD)

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang menentukan kebijakan dan strategi yang diambil oleh perusahaan. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan

keputusan. Dalam penelitian ini, Dewan Direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan pada periode t, termasuk CEO (Wardhani, 2007).

Dewan Direksi = \sum jumlah dewan direksi periode t

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi atau pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dalam perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini Proporsi Komisaris Independen dihitung dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan total jumlah komisaris dalam sebuah perusahaan (Siagian, 2010).

Komisaris Independen = $(\text{Jumlah Komisaris Independen}) / (\text{Jumlah Dewan Komisaris}) \times 100$

3. Komite Audit (KA)

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris yang bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan, dan system pengawasan internal serta auditor independen. Dalam penelitian ini, Komite Audit yang dihitung berdasarkan jumlah anggota komite audit (Siagian, 2010).

Komite Audit = \sum jumlah komite audit periode t

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yaitu sebanyak 79 populasi.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki atau diambil dari populasi jika populasi terlalu besar. Kesimpulan yang dipelajari dari sampel dapat diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representatif (Sugiyono, 2017:81). Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada dan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk

mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2021
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report) pada tahun 2018-2021
3. Perusahaan yang mencukupi komponen-komponen lain yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian.

Tabel 3.4.1

Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Sampel Akhir
1.	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021	79
2.	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut periode 2018-2021	(24)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2018-2021	(8)
	Sampel	47
	Total Sampel (4 tahun x 47 perusahaan)	188

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 47 sampel perusahaan sehingga memperoleh total 188 observasi.

Tabel 3.4.2

Sampel Perusahaan

No	Perusahaan	No	Perusahaan	No	Perusahaan
1	Agung Podomoro Land	17	Cahayasakti Investindo Sukses	33	Kawasan Industri Jababeka
2	Adhi Karya (Persero) Tbk	18	Puradelta Lestari Tbk	34	Gowa Makassar Tourism Developments
3	Alam Sutera Realty Tbk	19	Intiland Development Tbk	35	Trimitra Propertindo Tbk
4	Bekasi Asri Pemula Tbk	20	Duta Pertiwi Tbk	36	Lippo Cikarang Tbk
5	Bekasi Fajar Industrial Estate	21	Megapolitan Development	37	Lippo Karawaci Tbk
6	Binakarya Jaya Abadi Tbk	22	Bakrieland Development	38	Moderland Realty Tbk
7	Bhuwanata Indah Permai	23	Fortune Mate Indonesia	39	Metropolitan Kentjana
8	Sentul City Tbk	24	Gading Development Tbk	40	Mega Manunggal Properti
9	Bukit Darmo Properti Tbk	25	Perdana Gapura Prima Tbk	41	Metropolitan Land Tbk
10	Bumi Serpong Damai Tbk	26	Greedwood Sejahtera Tbk	42	Metro Realty Tbk
11	Ciputra Development Tbk	27	Jaya Real Property Tbk	43	Mitra Pemuda Tbk
12	Natura City Developments	28	Dms Propertindo Tbk	44	Indonesia Prima Properti
13	City Retail Developments	29	Nusa Raya Cipta Tbk	45	Surya Semesta Internusa
14	Plaza Indonesia Realty	30	Roda Vivatex Tbk	46	Urban Jakarta Propertindo
15	Pakwon Jati Tbk	31	Pikko Land Development	47	Wijaya Karya (Persero) Tbk
16	Ristia Bintang Mahkotasejati	32	Sitara Propertindo Tbk		

Sumber: www.idx.go.id (2018-2021)

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website 4\$\$\$. Melalui pertimbangan pemilihan tempat penelitian, bahwa data dan informasi yang disediakan di website merupakan informasi yang langsung dan cerminan data Rill yang berasal dari Bursa Efek Indonesia. Selain itu tingkat keakuratan data dan informasi yang tinggi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia telah dijamin. Dikarenakan perusahaan-perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang sudah go public sehingga laporan keuangan masing-masing perusahaan sudah menyiapkan laporan keuangan beserta lampiran tentang informasi perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia.

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penggunaan teknik dokumentasi dilakukan karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan beberapa literatur seperti jurnal, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data disebut dengan metode analisis data. Dalam pengumpulan data, langkah ini penting untuk suatu penelitian dikarenakan untuk memperoleh informasi penting dari data untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti sendiri memperoleh data berdasarkan sumber yang ada, sumber yang dimaksud disini ialah suatu objek penelitian dari mana sumber data yang akan didapatkan didalamnya menyajikan setiap data variabel yang dibutuhkan oleh peneliti, lalu melakukan perhitungan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga yang terakhir melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016:80).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), maksimum dan minimum (Ghozali, 2006).

3.6.2 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan salah satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (Ghozali, 2016 : 94). Regresi logistik disebut juga regresi biner karena variabel tergantung yang diprediksi merupakan variabel biner atau kategoris. Dalam regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi data pada variabel bebasnya karena variabel terikat yang terdapat pada regresi logistik merupakan variabel dummy (0 atau 1) (Nasiroh & Priyadi, 2018). Perumusan model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\ln \frac{p}{1-p} = \text{DISTRESSED} = \beta_0 + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{PKI} + \beta_3 \text{KA} + e$$

Keterangan :

DISTRESSED : Nilai 1 (satu) untuk perusahaan financial distressed dan Nilai 0 (nol) untuk perusahaan non-financial distressed

β_0 : Koefisien konstanta

DD : Ukuran Dewan Direksi

PKI : Proporsi Komisaris Independen

KA : Ukuran Komite Audit

e : error atau tingkat kesalahan yang mungkin terjadi.

Analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Ghozali (2006) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*)

Menurut Ghozali (2011) *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit test statistics* sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistic *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. Ghozali (2011) mendefinisikan *Likelihood L* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$. Statistik $-2\text{Log}L$ kadang-kadang disebut *likelihood ratio χ^2 statistics*, dimana χ^2 distribusi dengan *degree of freedom* $n-q$, q adalah jumlah parameter dalam model.

Statistik $-2\text{Log}L$ dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. Selisih $-2\text{Log}L$ untuk model dengan konstanta saja dan $-2\text{Log}L$ untuk model dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai χ^2 dengan df (selisih df kedua model). Adanya pengurangan nilai antara $-2\text{Log}L$ awal (initial $-2LL$ Function) dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2005).

3. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerker R Square)

Tujuan pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen melalui hubungan keduanya. Nilai *Nagelkerke R Square* digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Jika koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen dapat dikatakan berpengaruh penuh terhadap variabel dependen.

4. Tabel Klasifikasi 2 x 2 (Matriks Klasifikasi)

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress* sebuah perusahaan. Matriks ini menghitung jumlah nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*) pada variabel dependennya.

5. Estimasi Parameter

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji akan menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α).

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang mengelola pasar modal Indonesia. Kehadiran pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan melalui penjualan instrument keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, *right* dan lainnya ke masyarakat. Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri-industri perusahaan berdasarkan sektor-sektor yang dikelolanya terdiri dari: sektor pertanian, sektor pertambangan sektor manufaktur, sektor properti, sektor infrastruktur, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa investasi.

Perusahaan property dan *real estate* merupakan salah satu sector industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industry property dan *real estate* begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan *supply* tanah bersifat tetap. Diawal tahun 1968 industry property dan *real estate* mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industry property dan *real estate* sudah mulai terdaftar di BEI.

Mengingat perusahaan yang bergerak pada sector property dan *real estate* tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian,

maka seiring perkembangannya sector property dan *real estate* dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia.

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* sehingga mendapatkan sampel sebanyak 47 perusahaan atau 188 observasi (jumlah perusahaan yang terseleksi selama 4 tahun periode pengamatan) seperti yang disajikan dalam table 4.1. Data sampel diolah dengan menggunakan *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 23.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

1. Perhitungan Dewan Direksi (DD)

Dewan Direksi merupakan salah satu peranan penting bagi perusahaan yang digunakan untuk menentukan kebijakan dan strategi yang diambil oleh perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Untuk menghitung jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan *property and real estate* serta konstruksi selama periode 2018 - 2021 dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Dewan\ Direksi = \sum \text{jumlah dewan direksi periode } t$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan mengenai jumlah dewan direksi dari 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021 dapat disajikan didalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil perhitungan Jumlah Dewan Direksi pada perusahaan *property and real estate*
serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)

No	Kode Perusahaan					Rata-rata perusahaan
		2018	2019	2020	2021	
1	APLN	7	7	6	6	6,50
2	ADHI	6	6	6	6	6,00
3	ASRI	6	6	6	4	5,50
4	BAPA	3	3	2	2	2,50
5	BEST	5	5	5	4	4,75
6	BIKA	5	4	4	3	4,00
7	BIPP	3	3	3	3	3,00
8	BKSL	3	3	3	3	3,00
9	BKDP	4	4	4	4	4,00
10	BSDE	8	8	8	8	8,00
11	CTRA	11	10	10	10	10,25
12	CITY	3	2	2	2	2,25
13	NIRO	4	4	4	4	4,00
14	PLIN	6	4	4	4	4,50
15	PWON	6	6	6	6	6,00
16	RBMS	5	5	3	3	4,00
17	CSIS	4	3	3	2	3,00
18	DMAS	4	4	4	4	4,00
19	DILD	8	8	7	7	7,50
20	DUTI	5	5	5	5	5,00
21	EMDE	3	3	4	4	3,50
22	ELTY	4	4	4	4	4,00
23	FMII	5	5	4	4	4,50
24	GAMA	2	2	2	2	2,00
25	GPRA	4	3	3	3	3,25
26	GWSA	4	4	4	4	4,00
27	JRPT	6	6	6	6	6,00
28	KOTA	4	4	4	3	3,75
29	NRCA	6	6	6	5	5,75
30	RDTX	3	2	5	5	3,75
31	RODA	6	6	6	5	5,75
32	TARA	2	2	2	2	2,00
33	KIJA	6	6	6	4	5,50
34	GMTD	6	6	5	3	5,00
35	LAND	3	3	3	3	3,00
36	LPCK	7	5	4	4	5,00
37	LPKR	8	6	8	9	7,75
38	MDLN	4	4	3	4	3,75
39	MKPI	7	7	7	7	7,00
40	MMLP	3	2	2	3	2,50
41	MTLA	6	6	6	4	5,50
42	MTSM	4	4	2	2	3,00
43	MTRA	8	7	7	7	7,25
44	O.MRE	8	8	7	7	7,50
45	SSIA	4	4	4	4	4,00
46	URBN	4	3	3	2	3,00
47	WIKA	7	7	7	7	7,00
	Rata - Rata pertahun	5,11	4,79	4,66	4,4	4,74

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa rata - rata jumlah dewan direksi dalam 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi pada tahun 2018 - 2021 yaitu sebanyak 4 sampai dengan 5 orang. Hal ini dapat menjadi suatu perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya karena jumlah dewan direksi dapat bergantung pada kondisi masing - masing perusahaan dan pada periode tertentu.

2. Perhitungan Komisaris Independen (KI)

Komisaris Independen (KI) dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi atau pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dalam perusahaan tersebut. Untuk menghitung komisaris independen digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \text{Jumlah Komisaris Independen}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan mengenai komisaris independen dari 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021 disajikan didalam tabel 4.2. Hasil perhitungan komisaris independen sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil perhitungan Jumlah Komisaris Independen (KI) pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)

No	Kode					Rata-rata
	Perusahaan	2018	2019	2020	2021	perusahaan
1	APLN	1	1	1	1	1,00
2	ADHI	2	2	2	2	2,00
3	ASRI	2	2	2	2	2,00
4	BAPA	1	1	1	1	1,00
5	BEST	2	3	3	3	2,75
6	BIKA	1	1	1	1	1,00
7	BIPP	1	1	1	1	1,00
8	BKSL	1	2	1	1	1,25
9	BKDP	2	2	2	2	2,00
10	BSDE	2	2	2	1	1,75
11	CTRA	3	3	3	3	3,00
12	CITY	1	1	1	1	1,00
13	NIRO	1	1	1	1	1,00
14	PLIN	1	1	1	1	1,00
15	PWON	1	1	1	1	1,00
16	RBMS	1	1	1	1	1,00
17	CSIS	1	1	1	1	1,00
18	DMAS	2	2	2	2	2,00
19	DILD	1	1	2	2	1,50
20	DUTI	3	3	2	2	2,50
21	EMDE	2	2	2	2	2,00
22	ELTY	1	1	1	1	1,00
23	FMII	1	1	1	1	1,00
24	GAMA	1	1	1	1	1,00
25	GPRA	1	1	2	1	1,25
26	GWSA	1	1	1	1	1,00
27	JRPT	2	2	1	1	1,50
28	KOTA	1	1	1	1	1,00
29	NRCA	1	1	1	1	1,00
30	RDTX	1	1	2	2	1,50
31	RODA	1	1	1	1	1,00
32	TARA	1	1	1	1	1,00
33	KIJA	1	1	1	1	1,00
34	GMTD	3	2	2	2	2,25
35	LAND	1	1	1	1	1,00
36	LPCK	3	3	3	2	2,75
37	LPKR	3	2	2	3	2,50
38	MDLN	2	2	2	2	2,00
39	MKPI	4	4	4	5	4,25
40	MMLP	2	2	2	2	2,00
41	MTLA	2	2	2	2	2,00
42	MTSM	1	1	1	1	1,00
43	MTRA	1	1	1	1	1,00
44	O.MRE	3	4	3	2	3,00
45	SSIA	2	2	2	2	2,00
46	URBN	2	2	1	1	1,50
47	WIKA	3	3	3	3	3,00
	Rata - Rata pertahun	1,64	1,66	1,62	1,57	1,62

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa rata - rata jumlah komisaris independen dalam 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi pada tahun 2018 - 2021 yaitu sebanyak 2 orang. Hal ini dapat menjadi suatu perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya karena memiliki jumlah komisaris independen dapat bergantung pada kondisi masing - masing perusahaan dan pada periode tertentu.

3. Perhitungan Komite Audit (KA)

Komite Audit (KA) merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris yang bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan, dan system pengawasan internal serta auditor independen. Untuk menghitung komite audit digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit periode } t$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan mengenai komite audit dari 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021 disajikan didalam tabel 4.3. Hasil perhitungan komisaris independen sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil perhitungan Jumlah Komite Audit pada perusahaan *property and real estate* serta
konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)

No	Kode					Rata-rata
	Perusahaan	2018	2019	2020	2021	perusahaan
1	APLN	3	3	3	3	3,00
2	ADHI	3	3	3	3	3,00
3	ASRI	3	3	3	3	3,00
4	BAPA	2	2	3	3	2,50
5	BEST	3	3	3	3	3,00
6	BIKA	3	3	3	3	3,00
7	BIPP	3	3	3	3	3,00
8	BKSL	3	3	3	3	3,00
9	BKDP	3	3	3	3	3,00
10	BSDE	3	3	3	3	3,00
11	CTRA	3	3	3	3	3,00
12	CITY	3	3	3	3	3,00
13	NIRO	3	3	3	3	3,00
14	PLIN	3	3	3	3	3,00
15	PWON	3	3	3	3	3,00
16	RBMS	3	3	3	3	3,00
17	CSIS	3	3	3	3	3,00
18	DMAS	3	3	3	3	3,00
19	DILD	3	3	3	3	3,00
20	DUTI	3	3	3	3	3,00
21	EMDE	2	2	3	3	2,50
22	ELTY	3	3	3	3	3,00
23	FMII	3	3	3	3	3,00
24	GAMA	3	3	3	3	3,00
25	GPRA	2	3	3	3	2,75
26	GWSA	3	3	3	3	3,00
27	JRPT	3	3	3	3	3,00
28	KOTA	3	3	3	3	3,00
29	NRCA	3	3	3	3	3,00
30	RDTX	3	3	3	3	3,00
31	RODA	3	3	3	3	3,00
32	TARA	3	3	3	3	3,00
33	KIJA	3	3	3	3	3,00
34	GMTD	3	3	3	3	3,00
35	LAND	3	3	3	3	3,00
36	LPCK	3	3	3	3	3,00
37	LPKR	3	4	4	4	3,75
38	MDLN	3	3	3	3	3,00
39	MKPI	4	4	4	4	4,00
40	MMLP	3	3	3	3	3,00
41	MTLA	3	3	3	3	3,00
42	MTSM	3	3	3	3	3,00
43	MTRA	3	3	3	3	3,00
44	O.MRE	3	3	3	3	3,00
45	SSIA	3	3	3	3	3,00
46	URBN	3	3	3	3	3,00
47	WIKA	5	5	4	4	4,50
Rata - Rata pertahun		3	3,04	3,06	3,06	3,04

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa rata - rata jumlah komite audit dalam 47 perusahaan *property and real estate* serta konstruksi pada tahun 2018 - 2021 yaitu sebanyak 3 orang. Hal ini dapat menjadi suatu perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya karena memiliki jumlah komite audit dapat bergantung pada kondisi masing - masing perusahaan dan pada periode tertentu.

4. Perhitungan *Financial Distress* (EPS)

Financial Distress atau sering disebut kesulitan keuangan adalah kondisi dimana perusahaan berada dalam kesulitan keuangan sehingga tidak dapat menyediakan dana untuk memenuhi hutang lancarnya. Indikator dalam penelitian ini yaitu, Dummy, jika EPS negative (1), dan (0) jika EPS positif. Kriteria yang digunakan untuk menentukan perusahaan *financial distress* adalah dilihat berdasarkan *Earning per Share* (EPS). Penggunaan *Earning per Share* (EPS) sebagai proksi variabel dependen karena *Earning per Share* menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan perlembar saham yang akan dibagikan pada pemilik saham, dimana keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan operasinya. Jika EPS suatu perusahaan dalam kondisi negatif maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi *Financial Distress*.

Berdasarkan hasil pernyataan mengenai *financial distress* dari 47 perusahaan *property dan real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021 disajikan didalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil perhitungan *Financial Distress* pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021

No	Kode					Rata-rata
	Perusahaan	2018	2019	2020	2021	perusahaan
1	APLN	2,15	-0,45	-6,17	-28,65	-8,28
2	ADHI	181,00	186,00	6,73	15,50	97,31
3	ASRI	49,37	51,48	-52,30	7,41	13,99
4	BAPA	11,58	5,72	-2,12	-2,73	3,11
5	BEST	43,81	39,41	-11,94	-7,37	15,98
6	BIKA	-45,76	-42,15	-27,45	106,55	-2,20
7	BIPP	-9,27	-0,20	10,01	-1,25	-0,18
8	BKSL	6,08	0,90	-9,35	3,90	0,38
9	BKDP	-5,37	-4,12	-4,13	-4,83	-4,61
10	BSDE	67,43	147,00	14,12	64,49	73,26
11	CTRA	64,00	62,00	71,00	94,00	72,75
12	CITY	16,33	5,87	12,14	0,23	8,64
13	NIRO	-2,41	-0,92	2,59	-2,65	-0,85
14	PLIN	156,53	187,44	-162,67	126,64	76,99
15	PWON	52,80	56,47	19,31	28,71	39,32
16	RBMS	1,38	-13,93	-27,14	-14,33	-13,51
17	CSIS	-22,72	-5,65	2,30	7,56	-4,63
18	DMAS	10,30	27,70	27,96	14,83	20,20
19	DILD	20,00	24,00	7,00	1,00	13,00
20	DUTI	492,70	596,14	288,50	356,70	433,51
21	EMDE	5,23	-9,61	-17,11	308,04	71,64
22	ELTY	62,84	-18,76	-7,50	-6,28	7,58
23	FMII	2,17	1,00	-0,54	3,15	1,45
24	GAMA	0,12	0,17	-1,33	-1,74	-0,70
25	GPRA	8,67	11,44	6,96	12,11	9,80
26	GWSA	27,21	16,37	-6,45	2,78	9,98
27	JRPT	75,14	73,95	74,40	70,89	73,60
28	KOTA	6,00	-0,80	-2,80	-1,40	0,25
29	NRCA	48,00	41,00	23,00	21,00	33,25
30	RDTX	995,97	868,97	878,30	728,45	867,92
31	RODA	0,11	-11,36	-9,36	0,55	-5,02
32	TARA	0,05	0,06	-1,26	2,04	0,22
33	KIJA	1,97	5,71	-2,31	-0,25	1,28
34	GMTD	605,13	-690,54	-1043,45	-269,62	-349,62
35	LAND	12,21	1,05	-6,42	-4,15	0,67
36	LPCK	2818,00	221,00	-1364,00	69,00	436,00
37	LPKR	31,62	-43,84	-125,86	-22,65	-40,18
38	MDLN	2,04	33,12	142,63	-3,40	43,60
39	MKPI	1086,24	655,95	243,91	342,50	582,15
40	MMLP	32,00	16,00	-22,00	29,00	13,75
41	MTLA	62,93	63,62	35,57	48,60	52,68
42	MTSM	-29,79	-34,62	-37,40	-13,39	-28,80
43	MTRA	-27,00	-14,00	-118,00	-105,00	-66,00
44	O.MRE	78,08	-34,19	-128,18	-97,21	-45,38
45	SSIA	8,10	19,86	-19,10	-44,02	-8,79
46	URBN	31,03	37,20	26,32	19,78	28,58
47	WIKA	193,02	254,74	20,71	13,12	120,40
	Rata - Rata pertahun	153,77	59,28	-27,72	39,74	

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa *financial distress* pada penelitian ini menggunakan EPS (*earning pershare*) sebagai acuan suatu perusahaan dinyatakan mengalami *financial distress* atau tidak, dengan menggunakan dummy yaitu apabila EPS dalam suatu perusahaan bertanda negatif (1) maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami *financial distress*, sedangkan apabila EPS dalam suatu perusahaan bertanda positif (0) maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami *financial distress*.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	188	2.00	11.00	4.7394	1.90725
PKI	188	1.00	5.00	1.6223	.80833
KA	188	2.00	5.00	3.0319	.35682
DISTRESSED	188	.00	1.00	.3830	.48741
Valid N (listwise)	188				

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Pada Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum pada variabel dewan direksi yaitu 2, nilai maximum yaitu 11, nilai mean yaitu 4,74 dan nilai standart deviasi yaitu 1,91. Nilai minimum pada variabel komisaris independen yaitu 1, nilai maximum yaitu 5, nilai mean yaitu 1,62 dan nilai standart deviasi

yaitu 0,81. Nilai minimum pada variabel komite audit yaitu 2, nilai maximum yaitu 5, nilai mean yaitu 3,03 dan nilai standart deviasi yaitu 0,36. Nilai minimum pada variabel *financial distress* yaitu 0, nilai maximum yaitu 1, nilai mean yaitu 0,38 dan nilai standart deviasi yaitu 0,49.

4.3.2 Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (dewan direksi, komisaris independen dan komite audit) terhadap variabel dependen yakni *financial distress* yang merupakan variabel dengan jenis nominal. Terdapat 2 kategori dalam *financial distress* yakni perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki nilai 1 dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* memiliki nilai 0. Regresi logistik disebut juga regresi biner karena variabel tergantung yang diprediksi merupakan variabel biner atau kategoris. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Logit
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	
Step 1 ^a	DD	-.192	.088	4.703	1	.030
	KI	.203	.074	7.481	1	.006
	KA	1.454	.335	18.778	1	.000
	Constant	-.980	.513	3.649	1	.056

a. Variable(s) entered on step 1: DD, KI, KA.

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 20

Dari hasil pengolahan data menunjukkan persamaan regresi linier berganda yang menjelaskan adanya hubungan atau tidak ada hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari data tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi logit sebagai berikut:

$$Y = -0,980 - 0,192DD + 0,203KI + 1,454KA + e$$

Keterangan :

DD = Dewan Direksi

KI = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa variabel Dewan Direksi diperoleh nilai koefisien sebesar -0,192 artinya setiap unit kenaikan dewan direksi (DD), akan menurunkan *financial distress* sebesar 0,192 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Variabel dewan direksi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 dan koefisien negatif menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan negative dari variabel dewan direksi terhadap *financial distress*, sehingga **H1 diterima**.

Untuk variabel Komisaris Independen nilai koefisien sebesar 0,203 artinya setiap unit kenaikan komisaris independen (KI), maka *financial distress* perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,203 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Variabel komisaris independen ini memiliki nilai signifikansi 0,006 yang berada dibawah 0,05 dengan nilai koefisien positif menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif dari variabel komisaris independen terhadap *financial distress*, sehingga **H2 diterima**.

Untuk variabel komite audit nilai koefisien sebesar 1,454 artinya setiap unit kenaikan komite audit (KA) maka *financial distress* perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1,454 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.

Variabel komite audit ini memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05 dengan nilai koefisien positif yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif dari variabel komite audit terhadap *financial distress*, **sehingga H3 diterima.**

1. Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya, sedangkan apabila *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit test statistics* sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.617	8	.376

Sumber : Lampiran 2

Perhitungan menunjukkan angka probabilitas (Sig.) adalah 0,376 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood L* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input. Pada penelitian ini Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)
Block 0: Beginning Block

Iteration	Iteration History ^{a,b,c}	
	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	250.233
	2	250.229
	3	250.229

- a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 250,229
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Block 1: Method = Enter
Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	Iteration History ^{a,b,c,d}			Coefficients		
	-2 Log likelihood	Constant		DD	PKI	KA
Step 1	1	219.284	-.858	-.153	.169	1.228
	2	218.347	-.972	-.189	.200	1.438
	3	218.343	-.979	-.192	.203	1.454
	4	218.343	-.980	-.192	.203	1.454

- a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 250,229
d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Perhitungan $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada awal (block number = 0) menunjukkan angka -2 Likelihood adalah 250,229 sedangkan pada block number = 1 menunjukkan jika angka -2 Log mengalami penurunan menjadi 218,343. selisih antara nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada block 0 dan block 1 yaitu sebesar 31,886. Nilai tersebut sudah lebih besar dari pada nilai pada tabel Chi-Square yang menunjukkan nilai yaitu 7,815, maka hal tersebut menunjukkan jika model regresi diatas adalah model regresi diatas adalah model regresi yang baik.

3. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerker R Square)

Tujuan pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen melalui hubungan keduanya. Jika koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen dapat dikatakan berpengaruh penuh terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerker R Square*) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerker R Square)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	218.343 ^a	.156	.212

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Hasil dari perhitungan nilai dari *Nagelkerke R Square* pada penelitian ini adalah 0,212 yang mana menggambarkan jika variabel independen (dewan direksi, komisaris independen dan komite audit) bisa menjelaskan 21,2% terhadap

variabel dependen (*financial distress*). Sedangkan persentase sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

4. Tabel Klasifikasi 2 x 2 (Matriks Klasifikasi)

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress* sebuah perusahaan. Matriks ini menghitung jumlah nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*) pada variabel dependennya. Pada penelitian Tabel Klasifikasi 2 x 2 (Matriks Klasifikasi) dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tabel Klasifikasi 2 x 2 (Matriks Klasifikasi)
Classification Table^a

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		Tidak Mengalam Financial Distress	Mengalam Financial Distress		
Step 1	DISTRESSED	Tidak Mengalami Financial Distress	100	16	86.2
		Mengalami Financial Distress	39	33	45.8
Overall Percentage					70.7

a. The cut value is ,500

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan data pengujian yang dilakukan diketahui bahwa hasil perhitungan kemampuan memprediksi model ini cukup bagus. Hal ini dapat diketahui dari tingkat sukses total (*overall percentage*) sebesar 70,7%, dengan rincian 86,2% kelompok perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* dan 45,8% kelompok perusahaan yang mengalami *financial distress*. Skor 70,7% ini lebih besar dari 50% (*naive prediction*) sebagai *standard minimal* untuk menunjukkan tingkat ketepatan ramalan model.

Dari 188 sampel penelitian, yang mempunyai observasi kondisi perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* sebanyak 100 sampel sehingga ketepatan klasifikasi adalah 86,2%. Sedangkan observasi kondisi perusahaan melakukan *hedging* dengan prediksi perusahaan yang mengalami *financial distress* sebanyak 39 sampel sehingga ketepatan klasifikasi adalah 45,8% atau secara keseluruhan ketepatan model adalah 70,7%.

5. Estimasi Parameter

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji akan menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α) yaitu apabila

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.

Tabel 4.11
Estimasi Parameter
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	
Step 1 ^a	DD	-.192	.088	4.703	1	.030
	PKI	.203	.074	7.481	1	.006
	KA	1.454	.335	18.778	1	.000
	Constant	-.980	.513	3.649	1	.056

a. Variable(s) entered on step 1: DD, KI, KA.

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan jika variabel independen yakni dewan direksi, komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi karena memiliki nilai Sig. < 0,05.

Tabel 4.12
Estimasi Parameter

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
DD → FD	0,030	Signifikan
KI → FD	0,006	Signifikan
KA → FD	0,000	Signifikan

Sumber : Data sekunder diolah (2023)

Keterangan :

DD = Dewan Direksi

KI = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

FD = *Financial Distress*

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan pada hasil pengujian data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, karena memiliki nilai sig $0,030 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis 1 (H1) diterima yang menyatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, dimana sudah tertera pada bab 2 bagian pengembangan hipotesis. Dewan direksi adalah organ perusahaan yang menentukan strategi dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan atau strategi yang akan diambil untuk jangka panjang atau pendek oleh peran dewan direksi perusahaan tersebut. Peran pengawasan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan direksi dapat lebih efektif dengan keberadaan Komisaris Independen, karena komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi pengambilan kebijakan dan tindakan dewan direksi, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Direktur dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan terkait keadaan keuangan perusahaan jika perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan yang besar. Perusahaan yang mengalami *financial distress* tentunya akan sangat membutuhkan pertimbangan dari dewan direksi, dimana besarnya jumlah dewan direksi mempengaruhi kecilnya potensi perusahaan mengalami *financial distress*. Pengawasan yang lebih efektif dalam memonitor proses pelaporan keuangan. konsekuensi dari perkembangan perusahaan adalah kebutuhan akan pengetahuan khusus dalam pembuatan keputusan terkait *financial distress* dibutuhkan dan hal ini membuat ukuran dewan

direksi memberikan pengaruh yang lebih kecil dalam mekanisme pengawasan.. Tetapi jika dewan direksi tidak berfungsi secara optimal dalam mengelola aset, perusahaan tetap akan berpotensi mengalami *financial distress* dikarenakan dewan direksi tidak dapat menyeimbangkan pengelolaan perusahaan antara pengendalian manajemen dan juga masalah koordinasi. Walaupun demikian, banyaknya dewan direksi dapat mengurangi potensi terjadinya *financial distress* di dalam sebuah perusahaan dikarenakan pengawasan lebih yang ada di dalam perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah direksi memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya *financial distress*. Penelitian ini sejalan dengan *agency theory* bahwa dewan direksi memiliki peran penting untuk membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan, sehingga dapat menjadi nilai tambah untuk semua pihak kepentingan lainnya, hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang apabila terjadi dalam jangka panjang dapat memungkinkan timbulnya kesulitan keuangan bahkan sampai pada kebangkrutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastriana dan Fuad (2013) serta Hanifah dan Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

4.4.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan pada hasil pengujian data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. karena memiliki nilai sig $0,006 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis 2 (H2)

diterima yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, dimana sudah dijelaskan pada bab 2 bagian pengembangan hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya independensi maka akan berkurangnya kemungkinan *financial distress* didalam suatu perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan yang dapat memberikan pengaruh pada kemampuannya untuk bertindak independen. Fungsi dari komisaris independen di dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan perusahaan agar dewan direksi tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan dan terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. Jumlah komisaris independen yang rendah akan berdampak pada ketidakefektifan pengawasan manajemen pada perusahaan tersebut. Tetapi kondisi kebutuhan keberadaan komisaris independen di dalam sebuah perusahaan sering sekali hanya untuk sekedar memenuhi ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kondisi dimana tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh komisaris independen. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen belum tentu dapat bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, beberapa faktor dapat menyebabkan kinerja komisaris independen menjadi buruk, seperti tidak memiliki latar belakang akuntansi yang dapat mengakibatkan pengaruh pengawasan dalam laporan keuangan perusahaan dan faktor lainnya yang mengakibatkan pengawasan komisaris independen menjadi tidak efektif . Walaupun demikian, besarnya komisaris independen dapat mengurangi tindakan

oportunistik sehingga dapat menjauhkan perusahaan dari keadaan *financial distress*.

Menurut *teori keagenan*, diperlukan komisaris independen untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku direksi mengenai perilaku oportunistik mereka dalam suatu perusahaan. Teori Agensi berpendapat bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin efektif mereka dapat menjalankan tugasnya mengawasi dan mengontrol perilaku direktur eksekutif. Independensi dewan komisaris yang lebih besar mengarah pada keberadaan perusahaan lebih transparan dan dapat mengurangi asimetri informasi diantara investor.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2007) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*.

4.4.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan pada hasil pengujian data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, karena memiliki nilai sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis 3 (H3) diterima yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, dimana sudah dijelaskan pada bab 2 bagian pengembangan hipotesis.

Komposisi anggota komite yang di dominasi oleh pihak-pihak independen terhadap kinerja komite audit. Dengan kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik,

karena anggota yang independen mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan pernyataan diatas maka adanya komite audit diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam posisi kesulitan keuangan karena kasus penyimpangan tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian ini dapat diterima mengingat masih lemahnya praktik corporate governance di Indonesia. Di Indonesia, penentuan komposisi dan jumlah anggota komite audit minimal tiga orang yang seluruhnya adalah anggota independen yang terdiri atas satu orang komisaris independen dan dua anggota yang berasal dari luar emiten. Proses penunjukkan anggota komite audit masih belum jelas dan terbuka sehingga tingkat independensi komite audit masih patut untuk diragukan. Kemudian adanya ketentuan anggota komite audit kemungkinan menyebabkan keberadaan anggota komite audit pada perusahaan di Indonesia hanya sekedar memenuhi ketentuan regulasi dan menghindari sanksi yang ada sehingga belum efektif dalam menjalankan fungsinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastriana dan Fuad (2013) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2010) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai Pengaruh Good Corporate Terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Sektor Property, Real Estate dan Kontruksi Periode 2018-2021) dengan metode regresi logistic dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dewan Direksi dalam suatu perusahaan, maka dapat mengurangi potensi terjadinya *financial distress* di dalam perusahaan dikarenakan pengawasan lebih yang ada di dalam perusahaan.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Komisaris Independen terhadap *Financial Distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya independensi maka akan berkurangnya kemungkinan *Financial Distress* di dalam suatu perusahaan.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Komite Audit terhadap *Financial Distress*. Dengan adanya komite audit diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam posisi kesulitan keuangan karena kasus penyimpangan tata kelola perusahaan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada perusahaan terutama dalam mencegah terjadinya *Financial Distress*

2. Bagi perusahaan

Sebaiknya meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang dengan memperbaiki tingkat laporan keuangan-Nya Sehingga perusahaan akan mampu mencapai standart industry yang telah ditetapkan dan perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik sehingga dapat menambah kepercayaan terhadap pihak ekstern perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan dengan menggunakan pengukuran lain dalam mengukur *Financial Distress* seperti analisis *Z-Score* atau menghitung *Interest Coverage Ratio (ICR)*

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Jurnal Multiparadigma. 2022. "Wijaya dan Rasyid: Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress pada....." IV (4): 1633–42.
- Bani Saad, Aisyah Farasahya Abdillah. 2017. "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Tenure, Dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 15 (1): 70–85.
- Cahaya, Bernardinus Adi, dan Grace Widijoko. 2013. "Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Bumi Serpong Damai Kota Tangerang)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01 (01): 1689–99.
- Ekonomika, Fakultas, D A N Bisnis, dan Universitas Diponegoro. 2015. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4.
- Ginting, M. 2017. "Pengaruh current ratio dan debt to equity ratio (DER) terhadap financial distress." *Jurnal Manajemen* 3 (2): 37–44.
- Hanafi, Jeffry, dan Ririn Breliastiti. 2016. "Peran Mekanisme Good Corporate Governance dalam Mencegah Perusahaan Mengalami Financial Distress." *Jurnal Online Insan Akuntan* 1 (1): 195–220.
- Khairuddin, Fildan, Wahid Abdul Mahsuni, dan Afifudin. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress." *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang* 08 (01): 142–58.
- Khoiruddin, Moh, dan Diah Rahmawati. 2017. "Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress." *Management Analysis Journal* 6 (1): 1–12. Diakses pada 15 April 2023. Dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/view/8184%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/download/8184/9890>.
- Komala, Adeh Ratna, dan Nadia Laksmi. 2017. "Analisis Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate di BEI 2011-2015." *Jurnal Riset Akuntansi* 9 (2): 21–25. Diakses pada 10 mei 2023. Dari <https://doi.org/10.34010/jra.v9i2.537>.
- Mulansari, Retno, dan Wahyu Setiyorini. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Financial Indicators terhadap Financial Distress pada Perusahaan Property dan Real Estate." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 5 (2): 115–26. Diakses pada 20 April 2023. Dari <https://doi.org/10.26905/ap.v5i2.5766>.

- Muslimin, Dimas Wahyul, dan Syaiful Bahri. 2022. "Pengaruh Gcg, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress." *Owner* 7 (1): 293–301. Diakses pada 30 April 2023. Dari <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1249>.
- Nasiroh, Yiyin, dan Maswar Patuh Priyadi. 2018. "Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Financial Distress." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7 (9): 1–15.
- Sudaryo, Yoyo, Nunung Ayu Sofiaty, Ita Kumaratih, Astrin Kusumawardani, dan Ana Hadiana. 2022. "Dampak Profitabilitas, Rasio Likuiditas Dan Rasio Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property Dan Real Estate Di Indonesia." *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen* 4 (1): 25-32. Diakses pada 1 Mei 2023. Dari <https://doi.org/10.37577/ekonam.v4i1.489>.
- Sukamulja, Sukmawati, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma, dan Jaya Yogyakarta. 2005. "GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR KEUANGAN: DAMPAK GCG TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Kasus di Bursa Efek Jakarta)." *Good Corporate Governance ... (Sukmawati Sukamulja, 1–25. www.fcgi.*
- Syofyan, Arifin, dan Vinola Herawaty. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasinya." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, no. 2015: 1–7. Diakses pada 1 juni 2023. Dari <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5827>.
- Tjondro, David, dan Romanus Wilopo. 2011. "Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia." *Journal of Business and Banking* 1 (1): 1. Diakses pada 18 Mei 2023. Dari <https://doi.org/10.14414/jbb.v1i1.148>.
- Yuliani, Rahma, dan Adisti Rahmatiasari. 2021. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur di BEI)." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5 (1): 38–54. Diakses pada 10 Juni 2023. Dari <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>.
- Zidane, Rafly, dan Titiek Suwarti. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Capital Structure dan Size Terhadap Nilai Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 13 (03): 1013–23.

SAMPEL PERUSAHAAN

No	Nama Perusahaan	Kode
		Perusahaan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk	APLN
2	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI
3	PT Alam Sutera Realty Tbk	ASRI
4	PT Bekasi Asri Pemula Tbk	BAPA
5	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST
6	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	BIKA
7	PT Bhuwanata Indah Permai Tbk	BIPP
8	PT Sentul City Tbk	BKSL
9	PT Bukit Darmo Properti Tbk	BKDP
10	PT Bumi Serpong Damai Tbk	BSDE
11	PT Ciputra Development Tbk	CTRA
12	PT Natura City Developments Tbk	CITY
13	PT City Retail Developments Tbk	NIRO
14	PT Plaza Indonesia Realty Tbk	PLIN
15	PT Pakwon Jati Tbk	PWON
16	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	RBMS
17	PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	CSIS
18	PT Puradelta Lestari Tbk	DMAS
19	PT Intiland Development Tbk	DILD
20	PT Duta Pertiwi Tbk	DUTI
21	PT Megapolitan Development Tbk	EMDE
22	PT Bakrieland Development Tbk	ELTY
23	PT Fortune Mate Indonesia Tbk	FMII
24	PT Aksara Global Development Tbk	GAMA
25	PT Perdana Gapura Prima Tbk	GPRA
26	PT Greewood Sejahtera Tbk	GWSA
27	PT Jaya Real Property Tbk	JRPT
28	PT Dms Propertindo Tbk	KOTA
29	PT Nusa Raya Cipta Tbk	NRCA
30	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX
31	PT Pikko Land Development Tbk	RODA
32	PT Sitara Propertindo Tbk	TARA
33	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	KIJA
34	PT Gowa Makassar Tourism Developments Tbk	GMTD
35	PT Trimitra Propertindo Tbk	LAND
36	PT Lippo Cikarang Tbk	LPCK
37	PT Lippo Karawaci Tbk	LPKR
38	PT Moderland Realty Tbk	MDLN
39	PT Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI
40	PT Mega Manunggal Properti Tbk	MMLP
41	PT Metropolitan Land Tbk	MTLA
42	PT Metro Realty Tbk	MTSM
43	PT Mitra Pemuda Tbk	MTRA
44	PT Indonesia Prima Properti Tbk	O.MRE
45	PT Surya Semesta Internusa Tbk	SSIA
46	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk	URBN
47	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA

**Hasil perhitungan Jumlah Dewan Direksi pada perusahaan *property and real estate*
serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)**

No	Kode Perusahaan	2018	2019	2020	2021	Rata-rata perusahaan
1	APLN	7	7	6	6	6,50
2	ADHI	6	6	6	6	6,00
3	ASRI	6	6	6	4	5,50
4	BAPA	3	3	2	2	2,50
5	BEST	5	5	5	4	4,75
6	BIKA	5	4	4	3	4,00
7	BIPP	3	3	3	3	3,00
8	BKSL	3	3	3	3	3,00
9	BKDP	4	4	4	4	4,00
10	BSDE	8	8	8	8	8,00
11	CTRA	11	10	10	10	10,25
12	CITY	3	2	2	2	2,25
13	NIRO	4	4	4	4	4,00
14	PLIN	6	4	4	4	4,50
15	PWON	6	6	6	6	6,00
16	RBMS	5	5	3	3	4,00
17	CSIS	4	3	3	2	3,00
18	DMAS	4	4	4	4	4,00
19	DILD	8	8	7	7	7,50
20	DUTI	5	5	5	5	5,00
21	EMDE	3	3	4	4	3,50
22	ELTY	4	4	4	4	4,00
23	FMII	5	5	4	4	4,50
24	GAMA	2	2	2	2	2,00
25	GPRA	4	3	3	3	3,25
26	GWSA	4	4	4	4	4,00
27	JRPT	6	6	6	6	6,00
28	KOTA	4	4	4	3	3,75
29	NRCA	6	6	6	5	5,75
30	RDTX	3	2	5	5	3,75
31	RODA	6	6	6	5	5,75
32	TARA	2	2	2	2	2,00
33	KIJA	6	6	6	4	5,50
34	GMTD	6	6	5	3	5,00
35	LAND	3	3	3	3	3,00
36	LPCK	7	5	4	4	5,00
37	LPKR	8	6	8	9	7,75
38	MDLN	4	4	3	4	3,75
39	MKPI	7	7	7	7	7,00
40	MMLP	3	2	2	3	2,50
41	MTLA	6	6	6	4	5,50
42	MTSM	4	4	2	2	3,00
43	MTRA	8	7	7	7	7,25
44	O.MRE	8	8	7	7	7,50
45	SSIA	4	4	4	4	4,00
46	URBN	4	3	3	2	3,00
47	WIKA	7	7	7	7	7,00
	Rata - Rata pertahun	5,11	4,79	4,66	4,4	4,74

Sumber: data sekunder diolah (2023)

**Hasil perhitungan Jumlah Komisaris Independen (KI) pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)**

No	Kode Perusahaan	2018	2019	2020	2021	Rata-rata perusahaan
1	APLN	1	1	1	1	1,00
2	ADHI	2	2	2	2	2,00
3	ASRI	2	2	2	2	2,00
4	BAPA	1	1	1	1	1,00
5	BEST	2	3	3	3	2,75
6	BIKA	1	1	1	1	1,00
7	BIPP	1	1	1	1	1,00
8	BKSL	1	2	1	1	1,25
9	BKDP	2	2	2	2	2,00
10	BSDE	2	2	2	1	1,75
11	CTRA	3	3	3	3	3,00
12	CITY	1	1	1	1	1,00
13	NIRO	1	1	1	1	1,00
14	PLIN	1	1	1	1	1,00
15	PWON	1	1	1	1	1,00
16	RBMS	1	1	1	1	1,00
17	CSIS	1	1	1	1	1,00
18	DMAS	2	2	2	2	2,00
19	DILD	1	1	2	2	1,50
20	DUTI	3	3	2	2	2,50
21	EMDE	2	2	2	2	2,00
22	ELTY	1	1	1	1	1,00
23	FMII	1	1	1	1	1,00
24	GAMA	1	1	1	1	1,00
25	GPRA	1	1	2	1	1,25
26	GWSA	1	1	1	1	1,00
27	JRPT	2	2	1	1	1,50
28	KOTA	1	1	1	1	1,00
29	NRCA	1	1	1	1	1,00
30	RDTX	1	1	2	2	1,50
31	RODA	1	1	1	1	1,00
32	TARA	1	1	1	1	1,00
33	KIJA	1	1	1	1	1,00
34	GMTD	3	2	2	2	2,25
35	LAND	1	1	1	1	1,00
36	LPCK	3	3	3	2	2,75
37	LPKR	3	2	2	3	2,50
38	MDLN	2	2	2	2	2,00
39	MKPI	4	4	4	5	4,25
40	MMLP	2	2	2	2	2,00
41	MTLA	2	2	2	2	2,00
42	MTSM	1	1	1	1	1,00
43	MTRA	1	1	1	1	1,00
44	O.MRE	3	4	3	2	3,00
45	SSIA	2	2	2	2	2,00
46	URBN	2	2	1	1	1,50
47	WIKA	3	3	3	3	3,00
Rata - Rata pertahun		1,64	1,66	1,62	1,57	1,62

Sumber: data sekunder diolah (2023)

**Hasil perhitungan Jumlah Komite Audit pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021
(Dalam satuan orang)**

No	Kode Perusahaan	2018	2019	2020	2021	Rata-rata perusahaan
1	APLN	3	3	3	3	3,00
2	ADHI	3	3	3	3	3,00
3	ASRI	3	3	3	3	3,00
4	BAPA	2	2	3	3	2,50
5	BEST	3	3	3	3	3,00
6	BIKA	3	3	3	3	3,00
7	BIPP	3	3	3	3	3,00
8	BKSL	3	3	3	3	3,00
9	BKDP	3	3	3	3	3,00
10	BSDE	3	3	3	3	3,00
11	CTRA	3	3	3	3	3,00
12	CITY	3	3	3	3	3,00
13	NIRO	3	3	3	3	3,00
14	PLIN	3	3	3	3	3,00
15	PWON	3	3	3	3	3,00
16	RBMS	3	3	3	3	3,00
17	CSIS	3	3	3	3	3,00
18	DMAS	3	3	3	3	3,00
19	DILD	3	3	3	3	3,00
20	DUTI	3	3	3	3	3,00
21	EMDE	2	2	3	3	2,50
22	ELTY	3	3	3	3	3,00
23	FMII	3	3	3	3	3,00
24	GAMA	3	3	3	3	3,00
25	GPRA	2	3	3	3	2,75
26	GWSA	3	3	3	3	3,00
27	JRPT	3	3	3	3	3,00
28	KOTA	3	3	3	3	3,00
29	NRCA	3	3	3	3	3,00
30	RDTX	3	3	3	3	3,00
31	RODA	3	3	3	3	3,00
32	TARA	3	3	3	3	3,00
33	KIJA	3	3	3	3	3,00
34	GMTD	3	3	3	3	3,00
35	LAND	3	3	3	3	3,00
36	LPCK	3	3	3	3	3,00
37	LPKR	3	4	4	4	3,75
38	MDLN	3	3	3	3	3,00
39	MKPI	4	4	4	4	4,00
40	MMLP	3	3	3	3	3,00
41	MTLA	3	3	3	3	3,00
42	MTSM	3	3	3	3	3,00
43	MTRA	3	3	3	3	3,00
44	O.MRE	3	3	3	3	3,00
45	SSIA	3	3	3	3	3,00
46	URBN	3	3	3	3	3,00
47	WIKA	5	5	4	4	4,50
Rata - Rata pertahun		3	3,04	3,06	3,06	3,04

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Hasil perhitungan *Financial Distress* pada perusahaan *property and real estate* serta konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021

No	Kode					Rata-rata
	Perusahaan	2018	2019	2020	2021	perusahaan
1	APLN	2,15	-0,45	-6,17	-28,65	-8,28
2	ADHI	181,00	186,00	6,73	15,50	97,31
3	ASRI	49,37	51,48	-52,30	7,41	13,99
4	BAPA	11,58	5,72	-2,12	-2,73	3,11
5	BEST	43,81	39,41	-11,94	-7,37	15,98
6	BIKA	-45,76	-42,15	-27,45	106,55	-2,20
7	BIPP	-9,27	-0,20	10,01	-1,25	-0,18
8	BKSL	6,08	0,90	-9,35	3,90	0,38
9	BKDP	-5,37	-4,12	-4,13	-4,83	-4,61
10	BSDE	67,43	147,00	14,12	64,49	73,26
11	CTRA	64,00	62,00	71,00	94,00	72,75
12	CITY	16,33	5,87	12,14	0,23	8,64
13	NIRO	-2,41	-0,92	2,59	-2,65	-0,85
14	PLIN	156,53	187,44	-162,67	126,64	76,99
15	PWON	52,80	56,47	19,31	28,71	39,32
16	RBMS	1,38	-13,93	-27,14	-14,33	-13,51
17	CSIS	-22,72	-5,65	2,30	7,56	-4,63
18	DMAS	10,30	27,70	27,96	14,83	20,20
19	DILD	20,00	24,00	7,00	1,00	13,00
20	DUTI	492,70	596,14	288,50	356,70	433,51
21	EMDE	5,23	-9,61	-17,11	308,04	71,64
22	ELTY	62,84	-18,76	-7,50	-6,28	7,58
23	FMII	2,17	1,00	-0,54	3,15	1,45
24	GAMA	0,12	0,17	-1,33	-1,74	-0,70
25	GPRA	8,67	11,44	6,96	12,11	9,80
26	GWSA	27,21	16,37	-6,45	2,78	9,98
27	JRPT	75,14	73,95	74,40	70,89	73,60
28	KOTA	6,00	-0,80	-2,80	-1,40	0,25
29	NRCA	48,00	41,00	23,00	21,00	33,25
30	RDTX	995,97	868,97	878,30	728,45	867,92
31	RODA	0,11	-11,36	-9,36	0,55	-5,02
32	TARA	0,05	0,06	-1,26	2,04	0,22
33	KIJA	1,97	5,71	-2,31	-0,25	1,28
34	GMTD	605,13	-690,54	-1043,45	-269,62	-349,62
35	LAND	12,21	1,05	-6,42	-4,15	0,67
36	LPCK	2818,00	221,00	-1364,00	69,00	436,00
37	LPKR	31,62	-43,84	-125,86	-22,65	-40,18
38	MDLN	2,04	33,12	142,63	-3,40	43,60
39	MKPI	1086,24	655,95	243,91	342,50	582,15
40	MMLP	32,00	16,00	-22,00	29,00	13,75
41	MTLA	62,93	63,62	35,57	48,60	52,68
42	MTSM	-29,79	-34,62	-37,40	-13,39	-28,80
43	MTRA	-27,00	-14,00	-118,00	-105,00	-66,00
44	O.MRE	78,08	-34,19	-128,18	-97,21	-45,38
45	SSIA	8,10	19,86	-19,10	-44,02	-8,79
46	URBN	31,03	37,20	26,32	19,78	28,58
47	WIKA	193,02	254,74	20,71	13,12	120,40
	Rata - Rata pertahun	153,77	59,28	-27,72	39,74	

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Logistic Regression
Block 0: Beginning Block

		Iteration History ^{a,b,c}	
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	250.233	-.468
	2	250.229	-.477
	3	250.229	-.477

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 250,229
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^{a,b}

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		Tidak Mengalam Financiali Distress	Mengalam Financiali Distress		
Step 0	DISTRESSED	Tidak Mengalam Financiali Distress	116	0	100.0
		Mengalam Financiali Distress	72	0	.0
Overall Percentage					61.7

- a. Constant is included in the model.
- b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-.477	.150	10.105	1	.001	.621

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.	
Step 0	Variables	DD	4.614	1	.032
		PKI	6.144	1	.013
		KA	19.640	1	.000
	Overall Statistics	30.145	3	.000	

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	DD	PKI	KA
Step 1	1	219.284	-.858	-.153	.169	1.228
	2	218.347	-.972	-.189	.200	1.438
	3	218.343	-.979	-.192	.203	1.454
	4	218.343	-.980	-.192	.203	1.454

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 250,229

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	31.887	3	.000
	Block	31.887	3	.000
	Model	31.887	3	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	218.343 ^a	.156	.212

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.617	8	.376

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		DISTRESSED = Tidak Mengalami Financial Distress		DISTRESSED = Mengalami Financial Distress		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	16	16.605	3	2.395	19
	2	17	16.785	3	3.215	20
	3	15	15.182	4	3.818	19
	4	13	14.961	7	5.039	20
	5	15	12.609	5	7.391	20
	6	13	9.019	3	6.981	16
	7	10	10.441	10	9.559	20
	8	5	7.782	11	8.218	16
	9	7	7.836	12	11.164	19
	10	5	4.779	14	14.221	19

Classification Table^a

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		Tidak Mengalam Financiali Distress	Mengalam Financiali Distress		
Step 1	DISTRESSED	Tidak Mengalam Financiali Distress	100	16	86.2
		Mengalam Financiali Distress	39	33	45.8
	Overall Percentage				70.7

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DD	-.192	.088	4.703	1	.030	.825	.694	.982
	PKI	.203	.074	7.481	1	.006	1.224	1.059	1.416
	KA	1.454	.335	18.778	1	.000	4.279	2.217	8.258
	Constant	-.980	.513	3.649	1	.056	.375		

a. Variable(s) entered on step 1: DD, PKI, KA.

Correlation Matrix

		Constant	DD	PKI	KA
Step 1	Constant	1.000	-.718	-.405	-.394
	DD	-.718	1.000	-.121	-.061
	PKI	-.405	-.121	1.000	.150
	KA	-.394	-.061	.150	1.000

Casewise List^b

Case	Selected Status ^a	Observed DISTRESSED	Predicted	Predicted Group	Temporary Variable		
					Resid	ZResid	SResid
122	S	M**	.127	T	.873	2.623	2.045
131	S	M**	.127	T	.873	2.623	2.045

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.

b. Cases with studentized residuals greater than 2,000 are listed.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	188	2.00	11.00	4.7394	1.90725
PKI	188	1.00	5.00	1.6223	.80833
KA	188	2.00	5.00	3.0319	.35682
DISTRESSED	188	.00	1.00	.3830	.48741
Valid N (listwise)	188				

